

**PENDEKATAN AKUNTANSI KONSEP AKRUAL
(MENGAKRUALKAN BIAYA ATAU BIAYA DIAKRUALKAN)**

Dariana

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751
Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

ABSTRAK

Diantara banyaknya pekerjaan di wilayah akuntansi, salah satu yang paling sering dilakukan adalah mengakrualkan biaya tertentu. Bagi sebagian orang, urusan mengakrualkan biaya mungkin sudah menjadi aktivitas rutin sehingga tidak ada kesulitan. Tapi bagi sebagian orang lainnya, mungkin sebaliknya. Ada juga yang mengerti bagaimana caranya mengakrualkan suatu biaya, secara teknis, tetapi belum sungguh-sungguh paham konsep akrual, sehingga penerapannya dilakukan hanya berdasarkan apa yang dihafalkan saja (entah diperoleh dari masa kuliah atau apa yang pernah diberi tahu atasannya saat bekerja). Hasilnya? Penerapan akrual menjadi tidak konsisten (beberapa jenis transaksi yang mestinya diakrualkan tetapi tidak dilakukan).

Tak sedikit juga yang mengakrualkan biaya tetapi tidak dilakukan secara tuntas, entah karena pemahaman konsepnya yang kurang atau karena lalai semata. Di kelompok manapun seseorang berada, urusan akrual adalah bagian tak terpisahkan dari pekerjaan akuntansi. Itu artinya, setiap orang *accounting* mestinya, minimal, paham konsep dasar dan teknis akrual dengan baik. Penulisan ini akan memaparkan aplikasi untuk perlakuan akuntansi mengakrualkan biaya, bonus dan contoh-contoh yang menggunakan konsep akrual.

Kata Kunci: Pendekatan, Konsep Akrual dan Biaya.

A. Pendahuluan

Selama beberapa dekade terakhir dimana semakin meningkatnya permintaan oleh para politisi dan masyarakat dalam ranah akuntansi pemerintah, dimana sektor pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus dan mencatat mengenai arus kas dan kas itu sendiri. Tuntutan ini lebih menekan pemerintah untuk bagaimana pemerintah bertanggung jawab juga pada bagaimana pemerintah menggunakan uang rakyat dalam pengelolaan pemerintahannya. Pada akhirnya tuntutan dan permintaan dari masyarakat ini mengarah pada reformasi manajemen publik, yang dikenal sebagai New Public Management di banyak negara. Menurut Jones & Pendlebury, 1996 dan OECD,1993 mengatakan bahwa basis akrual dalam akuntansi dapat memenuhi hal-hal yang terkait dengan bagaimana sistem akuntansi yang lebih baik, mendukung dalam pembuatan keputusan, dan konsekuensi jangka panjang dari suatu kebijakan pemerintah. Basis akrual ini dianggap lebih mampu menyediakan hal tersebut dibandingkan dengan basis kas yang dipakai selama ini oleh negara kita. Reformasi sektor publik yang membuat pemerintah perlu untuk tidak hanya menggunakan laporan keuangan dalam

konteks kas saja tapi juga pada penggunaan informasi-informasi yang disediakan oleh laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Reformasi yang terjadi di negara ini juga berdampak pada tuntutan masyarakat untuk mereformasi juga masalah keuangan negara kita, sehingga Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara. Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”

Secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual dianggap mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan berbagai macam biaya pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dengan wajar. Pencatatan dan perhitungan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar dalam basis akrual membuat akuntansi berbasis akrual secara konseptual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Sedangkan apabila dilihat dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang saat ini diperlukan oleh pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Manfaat sistem berbasis akrual antara lain (Van Der Hoek, 2005): 1. Mendukung Manajemen Kinerja 2. Memfasilitasi Manajemen keuangan yang lebih baik 3. Memperbaiki pengertian akan biaya program 4. Memperluas dan meningkatkan informasi alokasi sumber daya 5. Meningkatkan pelaporan keuangan 6. Memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset (termasuk kas).

Basis akrual menurut PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) Nomor 01 adalah :

1. Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”
2. Basis akrual yang dimodifikasi (*modified accrual*) Pada basis akrual yang dimodifikasi hanya pendapatan yang memenuhi unsur measurable dan available yang dapat diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya, sedang pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut baru diakui

pada saat kas sudah diterima atau diakui sebagai pendapatan ditangguhkan. Sementara itu, belanja diakui pada periode dimana kewajiban timbul.

3. Basis kas (cash basis)

Basis kas menurut PSAP 01 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis kas, pendapatan diakui ketika kas diterima bukan ketika hak atas pendapatan tersebut timbul dan belanja diakui ketika dibayar bukan ketika kewajiban untuk membayar timbul. Pada basis kas, pembelian aset jangka panjang tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja, sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan.

4. Basis kas yang dimodifikasi (modified cash)

Basis kas yang dimodifikasi hampir sama dengan basis kas, hanya saja pada basis kas yang dimodifikasi pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu tertentu misalnya 1 bulan setelah berakhirnya tahun berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama waktu tertentu tersebut, yang berasal dari transaksi tahun lalu diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode sebelumnya. Arus kas yang telah diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun sebelumnya tersebut dikurangkan dari periode pelaporan tahun berjalan.

5. Basis kas menuju akrual (cash toward accrual)

Basis kas menuju akrual dianut di Indonesia, dan ini ditegaskan dalam KKAP paragraf 39 dan PSAP 01 paragraf 5, yang menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Meskipun menganut basis kas menuju akrual, entitas pelaporan dapat menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akuntansi akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas (KKAP Paragraf 42 dan PSAP 01 paragraf 6 dan 7).

B. Pengertian Akuntansi Berbasis Akrual

Basis akrual yang menurut PSAP 01

“basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”

Selain penjelasan tersebut, terdapat beberapa penjelasan lainnya yang akan lebih menambah wawasan tentang basis akrual ini. Basis akrual menurut International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) adalah :

”accrual basis means basis of accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its

equivalent is received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statement of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses”

C. Tujuan dan Manfaat Basis Akuntansi AkruaI.

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat dan dapat digunakan oleh para pengguna informasi. Heather Thompson, Project Manager dari Transition from Cash to Accrual Accounting Project, Public Expenditure Management, pemerintah BARBADOS, menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor *public*.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi).
6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan.

Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga basis akrual ini menyediakan estimasi yang lebih tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya. Manfaat-manfaat penerapan basis akrual, menurut H Thompson, akan mencakup hal-hal dibawah ini:

1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah
4. Meningkatkan daya pengelolaan asset dan kewajiban pemerintah.
5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.
6. Prinsip dan standar yang dapat diterima umum membentuk basis transaksi pelaporan.

7. Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.
8. Secara signifikan memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah.
9. Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual.

D. Penerapan Basis Akuntansi Akrual

Isu-isu terkait penerapan Basis Akuntansi Akrual IMF dalam makalah yang berjudul "*Transition to Accrual Accounting*" menyimpulkan beberapa isu terkait dengan penerapan basis akrual. Diantara isu tersebut adalah:

1. Perumusan kebijakan akuntansinya. Basis kas yang hanya mencatat transaksi penerimaan dan pembayaran kas secara relatif akan mudah dioperasikan. Pengakuan dan pengukuran/penilaian atas transaksi yang semakin kompleks menyebabkan persyaratan kemampuan teknis dan judgement yang lebih tinggi karena mengandung risiko kesalahan dan salah saji yang tinggi. Kebijakan akuntansi suatu negara, dengan demikian, haruslah disinkronisasikan dengan kebijakan internasional untuk mengurangi risiko seperti itu. Isu utamanya adalah bahwa pemerintah perlu memfokuskan pada materi pilihan kebijakan akuntansi mana yang paling tepat yang konsisten dengan standar akuntansinya.
2. Ada gap dengan standar internasional. Standar akuntansi pemerintah internasional yang diterbitkan oleh *The International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) dirancang untuk memfasilitasi penerapan umum pelaporan keuangan pemerintah dengan kualitas yang tinggi yang dapat diperbandingkan secara internasional. Namun demikian, masih terdapat jarak atau gap antara standar internasional dengan standar yang dikembangkan suatu negara. Pemerintah suatu negara perlu memformulasikan standarnya sendiri atau pedoman atas aspek tertentu yang standar internasionalnya belum final.
3. Informasi kas dalam kerangka kerja akrual. Penerapan basis akuntansi menuju basis akrual bukan berarti menghilangkan basis kas, tetapi pengelolaan kas merupakan bagian yang integral dari kerangka manajemen keuangan berbasis akrual. Basis akrual yang modern mempunyai fungsi-fungsi untuk mendukung basis akuntansi dan pelaporan secara kas.
4. Sinkronisasi antara akuntansi akrual dengan anggaran Sering diargumentasikan bahwa konsep akuntansi dan anggaran haruslah disamakan agar terdapat basis yang jelas dan transparan dalam perbandingan antara apa yang direncanakan pemerintah dan hasil keuangan yang aktual. Namun demikian, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara basis akuntansi akrual dan basis akrual dalam anggaran? Akuntansi berkaitan dengan pelaporan transaksi *ex post*, sementara anggaran merupakan perencanaan *ex ante* dalam basis akrual. Secara teknik, pemerintah dapat saja menerapkan basis

akuntansi akrual tanpa membuat perubahan kerangka penganggaran yang berbasis kas, dan, dengan demikian, dalam pelaporan akuntansi berbasis akrual, pertanggungjawaban anggaran berbasis kas akan tetap disusun. Sebagai contoh, negara seperti Amerika Serikat dan Perancis menerapkan pelaporan berbasis akrual tanpa mengadopsi anggaran berbasis

5. Klasifikasi anggaran dan akun standar. Apabila pemerintah menerapkan basis akrual pada akuntansi dan anggarannya secara simultan, akun standar dan klasifikasi anggaran sebaiknya disamakan, akan tetapi jika pemerintah menerapkan basis akrual hanya pada akuntansi dengan masih menerapkan basis kas pada anggarannya, akan ada perbedaan antara akun standar dan klasifikasi anggaran. Namun demikian, akun standar tetap akan mencakup laporan laporan yang berbasis akrual maupun kas.
6. Neraca awal. Neraca awal dari penerapan basis akrual harus didukung dengan informasi dan penjelasan yang cukup untuk kepentingan audit.

Bagaimana Konsep Akrual Diterapkan dan Mengapa Perlu Dilakukan?

Dengan bahasa sederhana, mengakrualkan suatu biaya artinya: mengakui suatu biaya yang sudah atau pasti akan terjadi di satu sisinya, akan tetapi nilai nominalnya belum bisa diketahui secara pasti, sehingga sudah berupa kewajiban yang harus diakui namun belum bisa disebut utang, untuk sementara disebut “akrual” dan masuk ke kelompok kewajiban jangka pendek di Neraca.

Misalnya: Mengakrualkan Biaya Bonus

Setiap pegawai tetap PT. BKS berhak atas bonus sebesar satu kali gaji pokok, yang dibagikan setiap akhir tahun. Berdasarkan kebijakan ini, maka pegawai accounting PT. BKS perlu MENAKRUALKAN bonus setiap bulan sesuai porsinya. *Mengapa? Mengapa biaya bonus perlu diakrualkan (tidak diakui sekaligus saja saat dibagikan di bulan Desember 2014)?*

Ada 2 alasan utama mengapa suatu biaya perlu diakrualkan:

Alasan- 1. Mematuhi Prinsip Kesesuaian (*matching principle*) – Secara umum penerapan konsep akrual berangkat dari keinginan untuk mematuhi prinsip kesesuaian (*the matching principle*), yang mengamanatkan agar: setiap biaya yang diakui bisa dihubungkan dengan revenue (pendapatan) yang dihasilkan pada periode yang sama. “Bonus” misalnya, bisa saja diakui sekaligus pada saat dibayarkan, tetapi cara itu membuat biaya bonus menjadi tidak sesuai (tidak *matching*) dengan revenue yang sudah timbul (dan diakui) sejak bulan Januari hingga Desember. Idealnya, biaya bonus diakui setiap bulan secara proporsional dari Januari sampai dengan Desember—sehingga teralokasi ke revenue di masing-masing bulan, DENGAN CARA ‘DIAKRUALKAN.’

Alasan-2. Mematuhi Prinsip Kehati-hatian (*conservatism principle*) – Penerapan konsep akrual juga didorong oleh prinsip kehati-hatian, yang mengamankan agar: aktiva (asset) tidak lebih diakui (*overstated*) di satu sisinya, dan kewajiban (liability) tidak kurang diakui (*understated*) di sisi lainnya. Salah satu wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah dengan TIDAK BOLEH TERLAMBAT mengakui kewajiban (liability.) Sepanjang kemungkinan terjadinya hampir mendekati pasti, kewajiban sudah harus diakui meskipun nilai nominalnya belum diketahui secara pasti. “Bonus” misalnya, sudah pasti akan terjadi tahun ini, dan sesungguhnya sudah menjadi hak pegawai sejak Januari. Dengan kata lain, perusahaan sudah memiliki kewajiban sejak Januari. Tetapi karena angka pastinya belum diketahui, maka BELUM disebut sebagai “Utang Bonus”, melainkan disebut sebagai “BONUS DIAKRUALKAN” (*accrued bonus*).

Biaya Apa Saja Yang Diakrualkan dan Bagaimana Contoh Penerapannya?

Secara garis besar, segala bentuk biaya/beban yang sifatnya rutin dan dibayarkan sekaligus pada suatu bulan dalam setahun—sementara memberi manfaat untuk semua bulan di sepanjang tahun—MESTINYA DIAKRUALKAN, sehingga prinsip kesesuaian dan kehati-hatian selalu terjaga secara konsisten. Kecuali bila nilai nominalnya samasekali tidak bisa diperkirakan.

Untuk lebih konkretnya, berikut adalah beberapa contoh biaya yang lumrah diakrualkan (beserta contoh penerapan perlakuan akuntansinya).

1. Bonus Diakrualkan

Jika pemberian bonus kepada pegawai sudah menjadi program tetap, berarti pemberian bonus sudah pasti akan terjadi. Untuk itu perusahaan tidak perlu menunggu hingga bonus sepenuhnya menjadi hak pegawai baru diakui sebagai biaya dan kewajiban secara sekaligus menjelang dibagikan. Perusahaan sebaiknya mengakrualkan bonus tersebut setiap bulan sebesar porsinya, sepanjang nilai nominalnya bisa diestimasi.

Contoh Kasus Penerapan:

Jika memakai contoh sebelumnya, dimana setiap pegawai tetap PT. BKS berhak atas bonus sebesar satu kali gaji pokok yang dibagikan setiap akhir tahun, maka PT. BKS perlu mengakrualkan bonus tersebut sejak bulan Januari. Untuk melakukan hal itu, pegawai accounting PT. BKS bisa melihat data tahun sebelumnya sebagai bahan untuk membuat estimasi. Anggap bonus yang dibagikan di tahun 2014 sebesar Rp 250,000,000, maka untuk bonus 2015 bisa diestimasi sebesar yang sama—jika tidak ada perubahan jumlah pegawai tetap secara signifikan. Selanjutnya Rp 250,000,000 dibagi 12 bulan, hasilnya Rp 20,833,333. Inilah yang diakrualkan setiap bulannya (sejak awal tahun hingga menjelang bonus dibayarkan.) dengan jurnal:

Biaya Bonus Rp 20,833,333
 Bonus Diakrualkan Rp 20,833,333

Catatan: “**Bonus Diakrualkan**” masuk kelompok kewajiban jangka pendek di Neraca.

Jika jurnal yang sama terus dimasukan setiap bulannya (sejak Januari hingga November), maka hingga menjelang penutupan buku bulan Desember akan nampak saldo “Bonus Diakrualkan” sebesar Rp 229,166,667 (=11 x 20,833,333) di Neraca, jika ditambah Rp 20,833,333 untuk alokasi bulan Desember, maka saldo akan menjadi 250,000,000, sama persis dengan perhitungan estimasi.

PADA KENYATAANNYA, bisa saja pihak HRD mengajukan permintaan bonus yang lebih besar atau lebih kecil dari angka tersebut.

Misal: Tanggal 27 Desember 2014, pihak HRD menyerahkan rincian perhitungan bonus dengan total Rp 270,000,000, sehingga estimasi lebih kecil Rp 20,000,000 jika dibandingkan dengan kenyataannya—yang disebabkan oleh adanya kenaikan gaji pokok pada beberapa pegawai. Nah, selisih tersebut dijurnal sekaligus di bulan Desember bersama-sama dengan alokasi untuk bulan Desember. Sehingga khusus di bulan Desember jurnalnya menjadi sbb:

Biaya Bonus Rp 40,833,333
 Bonus Diakrualkan Rp 40,833,333

(Note: 40,833,333 = 20,833,333 + 20,000,000)

Setelah jurnal tersebut dimasukan, maka saldo “Bonus Diakrualkan” (pada kelompok kewajiban di Neraca) menjadi sama persis dengan permintaan bonus yang diajukan oleh HRD, denga rincian sbb:

Bonus	Diakrualkan	–	Jan	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	Feb	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	Mar	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	Apr	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	May	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	June	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	July	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	Aug	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	Sep	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	Oct	2014	=	Rp	20,833,333
Bonus	Diakrualkan	–	Nov	2014	=	Rp	20,833,333
<u>Bonus</u>	<u>Diakrualkan</u>	<u>–</u>	<u>Des</u>	<u>2014</u>	<u>=</u>	<u>Rp</u>	<u>40,833,333</u>
Total Bonus Diakrualkan 2014 = Rp 270,000,000							

Karena total nilai nominal bonus sudah diketahui dan harus sudah segera dibayarkan, maka saldo “Bonus Diakrualkan” sudah bisa diakui sebagai “Utang Bonus.” Caranya?

Dibuatkan jurnal pembalik sbb:

Bonus Diakrualkan	Rp 270,000,000
Utang Bonus	Rp 270,000,000

Dengan jurnal pembalik ini, maka saldo akun ‘Bonus Diakrualkan’ menjadi nol, dan muncul saldo akun ‘Utang Bonus’ sebesar Rp 270,000,000, saat menjelang pembayaran bonus.

Katakanlah bonus dibayarkan tanggal 31 Desember 2014, atas pembayaran ini dicatat dengan jurnal:

Utang Bonus	Rp 270,000,000
Kas	Rp 270,000,000

Misalnya : Sdr. Ahmad pegawai tetap, dengan gaji pokok sebesar Rp 2,000,000, mengundurkan diri per 30 September 2014. Saat pembayaran gaji terakhir, bersama hak-hak lainnya, bonus yang berhak diterima (*earned*) oleh Sdr Ahmad sejak Januari s/d September juga dibayarkan sebesar $(2,000,000/12) \times 9 = \text{Rp } 1,500,000$. Sebelum hak bonus tersebut dibayarkan, porsi ‘Bonus Diakrualkan’ untuk Sdr. Ahmad harus dipindahkan ke ‘Utang Bonus’ terlebih dahulu, dengan jurnal:

Bonus Diakrualkan	Rp 1,500,000
Utang Bonus	Rp 1,500,000

Dan saat di bayar, utang bonus dihapuskan dengan jurnal:

Utang Bonus	Rp 1,500,000
Kas	Rp 1,500,000

Hal serupa dilakukan setiap kali ada pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan di tengah jalan (sebelum tahun berakhir). Jika semuanya diperhitungkan dengan benar, maka total saldo ‘Bonus Diakrualkan’ menjelang akhir tahun, mestinya, akan berkurang sebesar yang sama (kecuali jika ada alasan selain pengunduran diri atau di PHK)

2. Bonus/Komisi Penjualan Diakrualkan

Banyak perusahaan yang memberikan bonus/komisi untuk pegawai sales-nya di akhir tahun. Jika ini sudah pasti akan terjadi, tetapi total nominalnya belum diketahui secara persis, perusahaan juga perlu mengakrualkan biaya bonus/komisi ini, sepanjang nilai nominalnya bisa diestimasi. Yang paling lumrah digunakan sebagai nilai estimasi adalah data tahun sebelumnya. Paling aman, menurut saya: lihat data sampai beberapa tahun buku sebelumnya, cari nilai total pembayaran yang paling tinggi. Gunakan itu sebagai nilai estimasi. Bisa jadi komisi/bonus yang diberikan mengandung syarat tertentu, misalnya: komisi/bonus dibatalkan jika ada penjualan yang batal. Nah ini juga diperhitungkan (jadikan pengurang

estimasi) dengan melihat data periode-periode sebelumnya. Mengenai prosedur jurnalnya sama saja. Kecuali nama akunnnya yang disesuaikan, menjadi “Biaya Komisi/Bonus Penjualan” dan “Komisi/Bonus Penjualan Diakrualkan”.

3. Cuti Diakrualkan

Ada perusahaan yang menyediakan penggantian berupa uang untuk setiap hak cuti yang tidak diambil yang terus diakumulasikan dari tahun-ke-tahun. Ini juga perlu diakrualkan, dengan menggunakan estimasi dari data hak cuti yang ditebus dengan uang di periode-periode sebelumnya. Prosedur penjurnalannya juga sama dengan yang sebelumnya, kecuali nama akunnnya yang disesuaikan.

4. Royalti Diakrualkan

Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan royalti yang dimiliki oleh pihak lain (entah itu perusahaan atau perorangan/designer misalnya). Jika pembayaran royalti kepada pihak sudah rutin terjadi dan masih akan terus terjadi, maka biaya royalti juga perlu diakrualkan dengan menggunakan estimasi yang sama. Prosedur penjurnalannya juga sama, kecuali nama akunnnya yang disesuaikan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan Diakrualkan

Biasanya pihak perusahaan membayar pajak bumi dan bangunan sekali dalam setahun dengan nilai nominal yang flutuasinya relatif setabil. Ini juga perlu diakrualkan setiap bulannya sehingga biaya pajak bumi dan bangunan teralokasi secara proporsional dari bulan ke bulan (tidak terjadi sekaligus di bulan tertentu). Prosedur penjurnalannya juga sama, kecuali nama akunnnya yang disesuaikan.

Mengakrualkan Biaya Untuk Mempercepat Proses Tutup Buku

Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, alasan utama mengapa suatu biaya perlu diakrualkan ada 2 yaitu: (a) untuk mematuhi prinsip kesesuaian (*matching principle*) yang dicapai dengan mengalokasikan biaya secara proporsional setiap bulannya; dan (b) mematuhi prinsip kehati-hatian (*conservatism principle*) yang dicapai dengan pengakuan “akrual.”

Disamping alasan utama tersebut, ada juga alasan khusus mengapa suatu biaya biasanya diakrualkan untuk sementara, yaitu: untuk mempercepat proses tutup buku.

Pada saat proses tutup buku, ada saja biaya yang mestinya sudah harus dibebankan, dan kewajiban yang mestinya sudah harus diakui, BELUM BISA DIKETAHUI, karena alasan tertentu. **Misalnya:** Biaya listrik, tidak lumrah untuk diakrualkan. Tetapi seringkali proses tutup buku menjadi terhambat karena harus menunggu hingga nilai tagihan listrik diketahui dari PLN yang biasanya baru keluar setelah tanggal 5 bulan berikutnya. Supaya proses tutup buku tidak terhambat, maka “Biaya Listrik” untuk sementara diakui dengan menggunakan

nilai estimasi dari pembayaran listrik bulan sebelumnya, sedangkan di sisi kewajiban diakui “Listrik Diakrualkan” dengan jurnal:

Biaya Listrik	Rp 20,000,000 (pakai estimasi bulan sebelumnya)
Listrik Diakrualkan	Rp 20,000,000

(Note: Biaya listrik masuk Laba/Rugi, dan Listrik Diakrualkan masuk ke kelompok Kewajiban di Neraca).

Setelah tagihan listrik keluar (nilai pastinya sudah diketahui), akun “Listrik Diakrualkan” dibuatkan jurnal pembalik sehingga saldonya menjadi nol. Jika ada selisih antara biaya listrik (yang dihitung menggunakan estimasi) dengan total tagihan listrik, maka selisih tersebut dibuatkan jurnal penyesuaian.

Misalnya: dari estimasi 20,000,000, ternyata tagihannya Rp 25,000,000. Maka dibuatkan jurnal:

Listrik Diakrualkan	Rp 20,000,000
Laba Ditahan	Rp 5,000,000
Utang – PLN	Rp 25,000,000

(Note: Laba Ditahan di sisi debit, untuk koreksi biaya listrik yang kurang dibebankan—akibat Laba/Rugi sudah ditutup).

Saat pembayaran listrik dilakukan dijurnal:

Utang – PLN	Rp 25,000,000
Kas	Rp 25,000,000

Jika kenyataan tagihan lebih kecil dari estimasi (misalnya hanya Rp 15,000,000), maka jurnalnya menjadi:

Listrik Diakrualkan	Rp 20,000,000
Laba Ditahan	Rp 5,000,000
Utang – PLN	Rp 15,000,000

(Note: Laba ditahan di sisi kredit, untuk koreksi atas biaya listrik yang dibebankan terlalu besar/overstated)

Saat listrik dibayar, jurnalnya:

Utang – PLN	Rp 15,000,000
Kas	Rp 15,000,000

Biaya-biaya lain, misalnya: telepon, air, apapun itu, bisa diperlakukan dengan cara yang sama untuk mempercepat proses tutup buku. HANYA SAJA, perlu disadari bahwa pangkrualan seperti ini mengandung risiko.

Apa risikonya?

- Harus menjurnal beberapa kali untuk satu jenis transaksi, yang jika tidak diakrualkan tentu hanya perlu menginput jurnal satu kali saja.
- Untuk sementara, angka biaya menjadi tidak akurat karena menggunakan estimasi.

Untuk itu diperlukan pertimbangan yang baik, terutama sekali mengenai pengakuan biaya yang belum akurat. Setiap kali anda ingin mengakrualkan suatu biaya, sesungguhnya anda sedang dihadapkan pada pilihan antara KUALITAS Laporan Keuangan (yang akurat) dengan KETEPATWAKTUAN pelaporan. Pikirkan baik-baik, mana yang lebih penting prioritas bagi anda dan perusahaan? Jika perlu, bicarakan dengan pihak manajemen terlebih dahulu, buat kebijakan (policy) yang khusus mengatur hal ini, agar pihak manajemen menyadari risiko yang mungkin timbul, sehingga tidak perlu mempertanyakannya di kemudian hari.

E. Penutup

Basis ini merupakan dasar pengakuan atas suatu transaksi atau peristiwa ketika ia terjadi tanpa memperhatikan diterima atau dikeluarkannya kas atau setara kas yang terkait. Dasar akuntansi ini membenarkan bagi pelaku pembukuan untuk mencatat transaksi yang sebenar terjadi apabila memiliki kemungkinan atau pastian akan adanya peristiwa masuk atau keluarnya kas atau setara kas.

Konsep dasar basis akrual diterapkan dalam dua hal berikut ini:

1. Pengakuan Pendapatan

Hal ini diakui ketika perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan atas kegiatan usahanya seperti penjualan jasa/ barang. Pengakuan pendapatan ini tidak menunggu masa ketika kas/ bank betul-betul diterima sehingga akan mungkin terjadinya piutang tak tertagih.

2. Pengakuan Beban

Hal ini diakui ketika perusahaan sudah memiliki kewajiban untuk membayar meskipun perusahaan belum melakukan pembayaran sama sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan*, (Jakarta : IAI), 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2019/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2013/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2015/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat
- Wiwin Yadiati Ilham Wahyudi, *Pengantar Akuntansi*, Edisi I. Cetakan I (Jakarta : Kencana) 2006